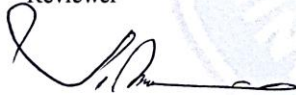


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peranan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Limbasari Kabupaten Purbalingga
Nama : Selma Nugraheni Fitriya
NIM : 14401241065
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Yogyakarta, 20 Mei 2018

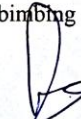
Reviewer



Dr. Suharno, M.Si

NIP 19680417 200003 1 001

Pembimbing



Dr. Sanarso, M.Si

NIP 19600521 198702 1 004

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
- ② Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

PERANAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI LIMBASARI KABUPATEN PURBALINGGA

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT, VILLAGE GOVERNMENT, AND SOCIETY IN VILLAGE TOURISM DEVELOPMENT PROGRAM IN LIMBASARI, PURBALINGGA

Oleh: Selma Nugraheni Fitriya, Pembimbing: Dr. Sunarso, M.Si

14401241065@student.ac.id

Selmanugraheni@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Peranan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat di Limbasari Kabupaten Purbalingga. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data kemudian teknik analisis data dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi data, *display* data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peranan pemerintah daerah memfasilitasi dalam bentuk fisik dan non fisik. Peranan secara fisik melalui penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sarana maupun prasarana. Peranan secara non fisik pemerintah daerah turut mengadakan *study banding* desa wisata, pelatihan desa wisata, kearifan lokal, pendampingan desa wisata, peningkatan daya tarik, pengembangan sumber daya manusia, *standarisasi* desa wisata, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Peranan pemerintah desa yang lebih dominan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Peranan masyarakat lebih menjadi pelaku langsung dalam kegiatan wisata dengan sistem *bottom up*.

Kata Kunci: *peranan, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat*

Abstract

This study aims to describe: the role of Local Government, Village Government, Society, and the supporting and inhibiting factors in the Tourism Village development program in Limbasari, Purbalingga. This is descriptive research using qualitative approach. Purposive technique was used to determine the research subject that consisted of Local Government, Village Government and Society in Limbasari, Purbalingga. Interviews and documentation were used to collect the data. Validity data used was cross check data techniques while the data analysis techniques were: data reduction, data categorization, display data and conclusions. The results of this study shows that: The role of local governments facilitate physical and non-physical forms. Physical role is done through giving the funds for infrastructure development and fulfillment of facilities and infrastructure. The non-physical role is done through participation of local governments by conducting comparative study of tourist villages, village tourism training, local wisdom, village tour assistance, increased attractiveness, human resources development, tourism village standardization, coordination, monitoring and evaluation. The role of village government the more dominant is to motivate the society to participate actively. The role of society is to be a direct actor in tourism activities with the system up bottom.

Keywords: *role, local government, village government, society*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alamnya yang cukup potensial. Pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Yoeti, 2008:4).

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial dan ekonomi serta politik yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 disebut dengan RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2027. Pembangunan dikatakan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki.

Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang akan dikembangkan menjadi daerah tujuan destinasi pariwisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purbalingga

Tahun 2015-2025 sebagai upaya merealisasikan Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak roda perekonomian rakyat.

Purbalingga akan menggerakkan sektor pariwisata di wilayah pinggiran seperti desa-desa sebagai upaya pemerataan perekonomian rakyat.

Oleh karena itu terdapat enam desa yang akan dijadikan destinasi wisata salah satunya Desa Limbasari di Kecamatan Bobotsari. Desa Wisata Limbasari merupakan desa yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti. Didukung oleh potensi kekayaan alam, pengunungan terbentang luas, sungai dan lahan pertanian menjadikan

Pemberdayaan masyarakat diperlukan sebagai situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki pola pikir yang sadar wisata sehingga diharapkan akan mengembangkan pemahamanyang mendorong untuk berperan serta dalam kegiatan wisata. Suatu pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki peranan menentukan di dalam pengembangan wisata sebagai suatu penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Selain masyarakat dan pemerintah desa, pemerintah daerah juga harus ikut andil dalam hal tersebut, pengembangan desa wisata perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan sekaligus sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab secara lebih penuh terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana,

investasi (akses terhadap sumber dana), lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis melalui kebijakan-kebijakan lokal yang lebih terarah serta sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Maka diketahui pengembangan pariwisata di suatu daerah harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan yang jelas agar potensi yang dimiliki oleh suatu daerah wisata dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dengan saling berkoordinasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah, peranan pemerintah desa, dan peranan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari Kabupaten Purbalingga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Lexy J. Moleong, 2010: 4) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan mampu menggambarkan tentang bagaimana peranan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari Kabupaten Purbalingga.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Limbasari Kabupaten Purbalingga. Peneliti memilih tempat ini karena Desa Wisata Limbasari pengembangannya berbasis masyarakat dan keterbukaan dari pihak pengelola maupun masyarakat sehingga

peneliti dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akan dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga bulan), yakni bulan Januari 2018 hingga bulan Maret 2018.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik yang digunakan bahwa peneliti memilih subjek tidak secara acak melainkan dengan sengaja, artinya peneliti menentukan subjek yang benar-benar sesuai dengan penelitian ini. Berdasarkan teknik *purposive*, adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti yaitu, Kepala Bidang Pariwisata Dinparpora (Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata) Kabupaten Purbalingga, staf pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga, Kepala Desa di Desa Wisata Limbasari, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Ketua Pengelola Wisata dan Pengelola Wisata.

Prosedur

Setelah mendapatkan data dari hasil penelitian dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat maka perlu dipersiapkan data untuk dianalisis. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: a) mengolah dan mempersiapkan data. b) membaca keseluruhan data. c) menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. d) menerapkan proses coding. e) menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang dibuat dapat disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam bentuk terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya. Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi

tentang peranan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari. Selanjutnya adalah dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, data profil dan catatan desa serta laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata di Limbasari.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi data, *display* data dan pengambilan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *Cross Check* data. Dilakukan menggunakan pengumpulan data ganda. *Cross check* dilakukan dengan cara mengecek hasil wawancara dengan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata di Limbasari

Menurut teori dari Pitana dan Gayatri (Rotua dan Rudi, 2006: 92-93) bahwa pemerintah daerah memiliki peranan dalam mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai: a) Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. b) Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program baik secara fisik ataupun non fisik. c) Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah menjalankan peranannya terutama dalam bidang pariwisata yang akan dikembangkan, Oleh karena itu peranan yang dilakukan antara lain:

Pertama, peranan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas. Pemerintah daerah memfasilitasi dalam bentuk fisik

dan non fisik. Dalam bentuk fisik pemerintah daerah menyalurkan dana kepada pemerintah desa yang digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan parasarana lebih dominan untuk wisata yang telah potensial disana yaitu "River Tubing". Pembangunan infrastruktur juga turut dilakukan. Bukan hanya pembuatan jalan tetapi pembangunan jembatan sebagai penghubung antar desa agar akses jalan menjadi lebih mudah.

Secara non fisik pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah di Kabupaten Purbalingga memfasilitasi dengan cara mengadakan *study banding* desa wisata ke lokasi desa wisata yang sudah maju seperti di Bandung. Tujuan dari pemerintah daerah melakukan hal itu untuk dapat dijadikan percontohan bagaimana pengelolaan dan pengembangannya jika diterapkan di Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan berbagai Dinas Terkait pemerintah daerah mengadakan pelatihan kuliner yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk wilayah Kabupaten Purbalingga yang akan menghasilkan produk olahan berupa makanan-makanan khas dari daerah wisata yang dapat dijadikan oleh-oleh serta pelatihan pembuatan cendera mata. Dinas Terkait adalah lembaga di luar pemerintahan daerah yang lebih membidangi bagian-bagian tertentu untuk fungsi pengembangan. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari khususnya untuk batik. Dalam bidang sarana prasarana jalan terdapat Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembangunan infrastruktur. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengurus segala aspek kelistrikan yang ada di Desa Limbasari. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat di Desa Limbasari khususnya untuk pelayanan wisatawan.

Kedua, pemerintah daerah memberikan motivasi dalam pengembangan desa wisata. Motivasi dilakukan kepada masyarakat agar mereka senantiasa untuk aktif dalam peningkatan daya tarik obyek wisata. Sebagai suatu desa wisata harus dipenuhi standarisasi desa wisata seperti kebersihan, sanitasi, keindahan dan keamanan serta mempromosikan desa wisata.

Ketiga, pemerintah daerah melakukan koordinasi. Tercapainya pembangunan yang ideal, maka diperlukan kesinambungan kinerja antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang saling bersinergi. Masyarakat selalu memberitahu tentang apa yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata sehingga dapat dikoordinasikan oleh pemerintah desa yang disalurkan kepada pemerintah daerah.

Keempat, Pemerintah daerah melakukan pengawasan. Pengawasan adalah upaya untuk meminimalisir adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang yang dimiliki. Masyarakat harus melaporkan kunjungan wisatawan secara rutin dan tentang kondisi yang ada dalam pengembangan desa wisata, tingkat perkembangan yang berhubungan dengan sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kelima, pemerintah daerah melakukan evaluasi. Rapat koordinasi yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi dengan mengundang perwakilan masing-masing desa wisata seperti ketua Pokdarwis, pengelola wisata dan perwakilan dari pemerintah desa.

B. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Limbasari

Pemerintah Desa dapat diartikan sebagai keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri (Widjadja, 2003:3).

Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa wisata terbagi kedalam dua bentuk yaitu secara fisik dan nonfisik. Secara fisik pemerintah desa turut memberikan bantuan dana yang berasal dari pendapatan asli desa untuk penambahan sarana dan prasarana. Perencanaan pembangunan turut dilakukan yakni pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang kegiatannya di wakili oleh perangkat desa, pokdarwis, pengelola serta sebagian masyarakat yang diundang sebagai suatu penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan telah menghasilkan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) untuk Desa Wisata Limbasari. Namun sebagian belum dapat terapkan karena dana yang tersedia kurang dikarenakan terdapat medan obyek wisata yang cukup sulit sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar.

Peranan pemerintah desa dalam bentuk nonfisik. Pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan seperti diklat tentang dunia wisata untuk masyarakat, pada tahun 2014 pernah ada pelatihan untuk gaet, *rescue* dasar air, ikut pelatihan *tour gaet*, sertifikasi *ecotourism gaet* (gaet local), study banding yang diadakan. Pada tahun 2016 ada pelatihan *resque* dasar air, pelatihan *ecotourism gaet* yang belum bersertifikasi.

Desa Wisata Limbasari merupakan wisata yang dikelola dan berada dalam lingkup desa. Rencana di Tahun 2018 pemerintah desa akan membuat ADART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) untuk desa wisata dan MOU (Memorandum Of Understanding) sebagai penetapan bahwa desa wisata yang ada di Limbasari adalah sebagai Badan Usaha Milik Desa, sehingga pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan wisata akan masuk ke pendapatan asli desa karena

pengelolaannya sendiri berasal dari desa bukan dari daerah.

Memotivasi masyarakat adalah peranan yang paling dominan dari pemerintah desa. Pemerintah desa selalu mengajak masyarakatnya agar dapat menggunakan sumber daya alam dengan baik. Pemerintah desa membina masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tetapi tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Peranan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Limbasari Kabupaten Purbalingga

Pendapat dari H.A.R Tilaar (2009: 287) mengemukakan partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk dapat mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang memerlukan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan serta pembangunan masyarakatnya. Secara nyata melalui pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat dalam wujud peranan terbentuk dengan memberikan kontribusi bagi Desa Wisata di Limbasari dalam hal sebagai berikut:

Pertama, peranan masyarakat dalam bentuk pikiran. Masyarakat menyalurkan ide atau gagasan untuk menjadikan Desa Limbasari sebagai desa wisata dengan melihat berbagai potensi yang dapat menghasilkan sehingga mereka melakukan perencanaan terhadap pembangunan desa wisata.

Kedua, peranan masyarakat dalam bentuk tenaga. Pengembangan desa wisata di Limbasari telah melibatkan masyarakatnya untuk ikut serta di dalamnya, dibuktikan oleh kegiatan masyarakat yang ikut andil dan terjun didalam kebersihan lingkungan, keramah tamahan, sopan santun. Kegiatan yang rutin dilakukan dengan kegotong-royonga untuk mengembangkan lokasi wisata, masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan desa wisata.

Ketiga, peranan masyarakat dalam implementasi dan pelaksanaan. Konsep

desa wisata yang ditonjolkan ada wisata budaya dengan mengedepankan kearifan lokal. Di Desa Limbasari pengelola yang sudah aktif dan sudah memberikan keuntungan baru 2 komunitas yaitu komunitas BasCamp Utara dan BasCamp Plana Rimba. BasCamp Utara lebih difokuskan ke wisata Tubing dan Bascamp Plana Rimba lebih fokus ke *tracking*, *camping* dan *sunrise* serta sudah menghasilkan dari segi rupiah untuk produk jualannya. Komunitas BasCamp Utara atau disebut juga dengan BCU mempunyai kegiatan seperti *outbound* dan *gathering* yakni sejenis kegiatan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan). BCU juga mencoba mengangkat produk unggulan di Desa Limbasari yaitu pembuatan gula kelapa (paket gendhis jawi) dari pembuatan awal sampai percetakan, dan batik khas Desa Limbasari juga menjadi produk dari BCU. Obyek wisata unggulan yang dikelola oleh BCU adalah River Tubing.

Peranan masyarakat dalam menghasilkan keuntungan. Sektor perekonomian masyarakat di desa tentunya akan meningkat dengan dibukanya desa wisata di Limbasari. Tujuan bisnis secara otomatis dengan dibentuknya menjadi desa wisata masyarakat sekitar dengan pengelola mendapatkan penghasilan. Salah satunya sebagai pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan adanya wisata. Penyewaan rumah sebagai peminatan atau homestay dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat. Setidaknya dari hal itu ada beberapa masyarakat yang mendapatkan penghasilan langsung seperti *gaet*, ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) untuk konsumsi dan secara tidak langsung untuk penjual warung-warung. Pengelola angkutan juga ikut dilibatkan. Pengunjung atau tamu dari luar kota yang memakai bus pariwisata yang besar otomatis harus membutuhkan supir angkot. Dengan hal tersebut lapangan pekerjaan akan muncul sehingga masyarakat tidak perlu keluar kota untuk mencari pekerjaan.

Peranan masyarakat dalam bentuk evaluasi. Evaluasi berupa laporan kunjungan dan sebagainya, nanti biasanya pemerintah daerah mengundang perwakilan, biasanya Ketua Pokdarwis dan Kepala Desa, diundang ke Dinas Pariwisata, untuk memaparkan tentang permasalahan yang terjadi dan kegiatan wisata serta program kerja.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata di Limbasari

Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata di Limbasari yaitu faktor Internal antara lain terdiri dari Potensi alam di desa yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya manusia. Dukungan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Faktor eksternal yaitu minat wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Limbasari karena adanya daya tarik wisata berupa wisata minat khusus.

Selain terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata di Limbasari antara lain faktor internal yakni kurangnya dana. Pada setiap kegiatan, selain subyek yang menjadi faktor utama, diperlukan faktor pendukung lainnya seperti pendanaan. Pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang dimaksudkan adalah pendapat mengenai tanggung jawab, tugas dan fungsi dari masing-masing pihak antara lain pemerintah desa, pengelola,

Pokdarwis maupun masyarakat harus mempunyai tujuan yang sama. Partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat yang tergabung di dalam pengelola wisata tidak semuanya aktif dalam melakukan kegiatan. Faktor Eksternal yaitu masuknya budaya asing dari para wisatawan yang berkunjung yang akan berpengaruh terhadap budaya masyarakat di Desa Wisata Limbasari.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Wisata Limbasari Kabupaten Purbalingga, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata di

Limbasari paling berperan dalam penyediaan fasilitas dalam bentuk fisik melalui penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sarana dan prasarana.

2. Peranan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Limbasari lebih berperan dalam bentuk non fisik melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat untuk membentuk kesadaran masyarakat.
3. Peranan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari yaitu dalam bentuk tenaga, melalui kegiatan wisata masyarakat menjadi pelaku langsung dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata.
4. Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata di Limbasari meliputi potensi alam, sumber daya manusia, dukungan dari pemerintah daerah pemerintah desa dan minat wisatawan. Faktor penghambat yaitu kurangnya dana, pemahaman yang berbeda antara pemerintah desa, pengelola dan pokdarwis, partisipasi sebagian masyarakat masih rendah dan pengaruh budaya asing yang masuk ke Desa Limbasari

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam peranan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan program-program yang mengarah kepada pembinaan, pemberian, pelatihan-pelatihan yang menyangkut adanya desa wisata, pembinaan administrasi dan pembinaan terhadap Pokdarwis.
2. Perlu diadakan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan melalui para investor agar kegiatan pengembangan maupun pembangunan

wisata dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.

3. Pengembangan desa wisata perlu dijadikan skala prioritas. Karena dengan terbangunnya desa wisata dapat menjadikan desa tersebut mandiri dan peningkatan perekonomian rakyat.

Kepariwisataan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Damanik, J. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dinas Pariwisata. 2014. Laporan Akhir: Kajian Pengembangan Desa Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simamora, Rotua Kristin & Sinaga, Rudi Salam. 2006. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politika. Vol. 4 No.1.
- Tilaar, H. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yoeti, Okta A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.

Peraturan Perundan-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan